

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pupuk menjadi hal penting dalam pertanian Indonesia karena dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pupuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan produksi beras nasional dengan memberikan bantuan pupuk kepada para petani. Bantuan pupuk ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional.

Penyaluran pupuk subsidi merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun, dalam pelaksanaannya, penyaluran pupuk subsidi sering kali mengalami permasalahan seperti penyaluran pupuk yang tidak tepat sasaran. Pupuk subsidi seharusnya diberikan kepada petani yang berhak menerimanya, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 2 hektar. Namun, dalam praktiknya, banyak petani yang tidak berhak menerima pupuk subsidi, tetapi tetap mendapatkannya. Hal ini menyebabkan pupuk subsidi menjadi langka dan petani yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya. Selain tidak tepat sasaran pupuk subsidi ini sering kali diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Pupuk subsidi dijual kembali kepada petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET). Hal ini menyebabkan petani yang berhak menerima pupuk subsidi justru tidak mendapatkannya dan petani yang tidak berhak menerimanya justru mendapatkannya.¹

Kebijakan pupuk bersubsidi di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI No. 15 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Perpres No. 77 Tahun 2005. Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam

¹ Devi Nurul Fahmi and Maria Maria, "Persepsi Petani Terhadap Implementasi Kartu Tani (Studi Kasusdesa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang)," *Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 19, no. 2 (2020): 315–30, <https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.2.315-330>.

Pengawasan.² Prinsip Tepat yang harus dipenuhi dalam penyaluran alokasi distribusi pupuk bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013, mencakup enam aspek utama: Enam Prinsip Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, dan Mutu.³

Berdasarkan eputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022, alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,14 juta ton adapun jenis pupuk subsidi adalah Urea sebanyak 5,94 juta ton, NPK Phonska 1,5 juta ton dan NPK Formula Khusus 1,7 juta ton. Dari jenis pupuk subsidi tersebut Kementerian Pertanian juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) dimana Urea: Rp 2.250/kg, NPK Phonska: Rp 2.300/kg dan NPK Formula Khusus: Rp 3.300/kg. Kemudian dalam kebijakan tersebut juga mengatur syarat sebagai penerima manfaat dimana Petani yang terdaftar dalam e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), Petani yang memiliki luas lahan maksimal 2 hektar dan Petani yang mengusahakan tanaman padi, jagung, dan kedelai.⁴

Kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah untuk mendukung sektor pertanian di Indonesia. Di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, program ini juga diimplementasikan di wilayah tersebut, pasalnya wilayah ini memiliki luas lahan pertanian yang cukup luas di wilayah jawa barat sehingga kebijakan pupuk subsidi layak di implementasikan di wilayah tersebut. Kabupaten Indramayu di kelilingi hamparan luas sektor pertanian padi. Sektor pertanian, terutama tanaman pangan, memainkan peran krusial dalam perekonomian Kabupaten Indramayu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indramayu sebagai lumbung padi, baik di tingkat provinsi maupun

² Peraturan Presiden, “Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan,” (Pasal. 2 ayat 1.)

³ Peraturan Republik Indonesia, “Permendag No. 15 Tahun 2013. Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian,” 2013.

⁴ Kenteri Pertanian RI, “Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 Tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,” 2023.

nasional. Potensi ini didukung dengan adanya lahan pertanian yang subur dan luas, Sistem irigasi yang memadai memastikan ketersediaan air untuk pertanian, terutama di musim kemarau, Petani Indramayu memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang pertanian, khususnya dalam budidaya padi. Berdasarkan Data BPS Jawa Barat tahun 2023 luas panen tanaman padi Kabupaten Indramayu terluas dari seluruh kabupaten yang ada di Jawa Barat, tercatat luas panen pada tahun 2023 adalah 231.354 Hektar⁵

Tabel 1. 1 Luas Panen padi Di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat Provinsi Jawa Barat	Luas Panen Tanaman Padi (Ha) (Hektar)					
	2021		2022		2023	
Provinsi Jawa Barat	1604109		1662404		1580873	
Bogor	57426	3,6%	56002	3,4%	51678	3,3%
Sukabumi	89510	5,6%	95013	5,7%	93986	5,9%
Cianjur	113539	7,1%	115877	7,0%	115292	7,3%
Bandung	50553	3,2%	47538	2,9%	49778	3,1%
Garut	75966	4,7%	75951	4,6%	75648	4,8%
Tasikmalaya	82935	5,2%	81310	4,9%	71309	4,5%
Ciamis	55013	3,4%	55844	3,4%	54014	3,4%
Kuningan	47236	2,9%	48250	2,9%	44723	2,8%
Cirebon	84946	5,3%	84892	5,1%	82890	5,2%
Majalengka	97516	6,1%	100951	6,1%	99958	6,3%
Sumedang	53341	3,3%	56662	3,4%	53486	3,4%
Indramayu	227051	14,2%	245329	14,8%	231354	14,6%
Subang	163947	10,2%	177986	10,7%	172983	10,9%
Purwakarta	32931	2,1%	34397	2,1%	32011	2,0%
Karawang	197916	12,3%	204326	12,3%	182672	11,6%
Bekasi	100338	6,3%	103089	6,2%	93934	5,9%
Bandung Barat	27655	1,7%	29202	1,8%	27090	1,7%
Pangandaran	27678	1,7%	30116	1,8%	30253	1,9%
Kota Bogor	36	0,002%	32	0,002%	25	0,002%
Kota Sukabumi	2456	0,15%	2176	0,13%	2654	0,17%
Kota Bandung	1026	0,1%	995	0,1%	891	0,1%
Kota Cirebon	232	0,01%	160	0,01%	137	0,01%
Kota Bekasi	478	0,030%	454	0,027%	307	0,019%
Kota Depok	45	0,003%	15	0,001%	6	0,0004%
Kota Cimahi	77	0,005%	60	0,004%	77	0,005%
Kota Tasikmalaya	8540	0,5%	9798	0,6%	8092	0,5%
Kota Banjar	5723	0,4%	5978	0,4%	5625	0,4%

Sumber: BPS Jawa Barat

⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Barat, "Luas Panen Padi Di Jawa Barat," 2023, <https://jabar.bps.go.id/indicator/53/300/1/luas-panen-tanaman-padi-ha-.html>. [Diakses pada 05/04/2024]

Berdasarkan data BPS, Kabupaten Indramayu merupakan wilayah nomor satu dalam hal luas panen padi di Jawa Barat, bahkan di tingkat nasional, dimana dari tahun 2021 memiliki presentasi tertinggi yaitu 14,2%, kemudian pada tahun 2022 masih menempati posisi pertama dengan 14,8% dan tahun 2023 juga masih menempati daerah panen tertinggi di Jawa Barat sebesar 14,6%, karena itu, kabupaten Indramayu dianggap sebagai lumbung padi Jawa Barat, seperti yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Indramayu selama panen raya pada Jumat, 13 September 2023. Dengan adanya predikat lumbung padi Jawa Barat dan nasional daerah tersebut sangat potensi dalam penjualan pupuk, sehingga sering kali terjadi permasalahan terhadap pendistribusian pupuk subsidi, harga yang tidak sesuai, bahkan pendataan yang tidak semestinya.⁶

Tabel 1. 2 Penyaluran Pupuk Subsidi

Penyaluran Pupuk Subsidi Kabupaten Indramayu Tahun 2022-2023

Tahun	Jenis Pupuk	Alokasi (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
2022	Urea	70.488	45.716	65%
	NPK Phonska	43.449	28.262	65%
2023	Urea	59.520	23.808	40%
	NPK Phonska	34.427	17.214	50%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu

Pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam jenis pupuk yang mendapatkan subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menyederhanakan jenis pupuk yang disubsidi dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program. Sebelumnya, terdapat beberapa jenis pupuk yang mendapatkan subsidi, seperti urea, SP-36, ZA, NPK, pupuk organik, dan pupuk organik cair berubah menjadi dua jenis pupuk utama, yaitu urea dan NPK. Kedua jenis pupuk ini dianggap sebagai pupuk yang paling penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan utama. Dari data di atas, terlihat bahwa Alokasi pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Persentase realisasi pupuk subsidi bervariasi antara jenis pupuk dan tahun. Persentase realisasi pupuk subsidi Urea lebih tinggi dibandingkan dengan NPK

⁶ DISKOMINFO INDRAMAYU, "Presiden Jokowi Panen Padi Di Indramayu, Kabupaten Penghasil Padi Terbesar Di Indonesia," Diskominfo Indramayukab, 2023, <https://diskominfo.indramayukab.go.id/presiden-jokowi-panen-padi-di-indramayu-kabupaten-penghasil-padi-terbesar-di-indonesia/>. [Diakses pada 05/04/2024]

Phonska di semua tahun. Pada tahun 2023, realisasi pupuk subsidi Urea dan NPK Phonska per Juli 2023 masih jauh di bawah alokasi.

Penurunan penyaluran pupuk subsidi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam faktor Internal terdapat keterbatasan anggaran untuk mengalokasikan pupuk subsidi. Hal ini menyebabkan alokasi pupuk subsidi berkurang dari tahun ke tahun, kemudian ketidaktepatan Data Petani dimana penerima pupuk subsidi yang tidak akurat dapat menyebabkan penyaluran pupuk subsidi tidak tepat sasaran, penyalahgunaan pupuk subsidi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat mengurangi jumlah pupuk subsidi yang sampai ke tangan petani yang berhak. Kemudian dalam faktor Eksternal terdapat kenaikan harga pupuk Non-Subsidi, yang mana kenaikan harga pupuk non-subsidi dapat mendorong petani untuk beralih ke pupuk subsidi, sehingga meningkatkan permintaan pupuk subsidi, kemudian perubahan kebijakan pemerintah terkait pupuk subsidi, seperti pengurangan jenis pupuk subsidi atau perubahan harga eceran tertinggi (HET), dapat berdampak pada penyaluran pupuk subsidi.

Penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Indramayu masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi pupuk subsidi, memastikan ketersediaan pupuk subsidi, meningkatkan sosialisasi kepada petani, dan memperkuat pengawasan penyaluran pupuk subsidi. Penurunan penyaluran pupuk subsidi merupakan permasalahan yang kompleks dan membutuhkan solusi yang komprehensif dari berbagai pihak. Dengan mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penyaluran pupuk subsidi, diharapkan penyaluran pupuk subsidi dapat kembali optimal dan memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat luas.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, dan untuk menanggulangi masalah tersebut Pemerintah berkordinasi dengan beberapa lembaga untuk mengontrol pendistribusian serta penjualan, dalam hal ini upaya tersebut tertuang melalui Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 521.33/Kep.468-DKPP/2022 dimana SK ini keputusan penting yang mengatur alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Indramayu selama tahun 2023. Untuk memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten

Indramayu, pemerintah kabupaten Indramayu telah bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dengan jajaran TNI yang ada di Kodim 0616 Indramayu. Kerjasama dan sinergitas antara Pemkab Indramayu dan Dandim 0616 juga penting untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dengan adanya kebijakan melalui Sk Bupati Indramayu, diharapkan memiliki dampak yang baik juga dalam pertanian indramayu, dimana harapan tersebut dapat mengontrol harga eceran pupuk subsidi di seluruh wilayah indramayu dan juga dapat mengawasi pendataan serta penjualan yang sesuai dengan perundang-undangan.

Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak luput dari beberapa permasalahan yang patut diidentifikasi dan dievaluasi secara mendalam. Dalam rangka melakukan observasi tentang implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kecamatan Anjatan, banyak aktor dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif. Partisipasi dan kerjasama dari petani, distributor, dan lembaga-lembaga terkait lainnya mutlak diperlukan agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pertanian di wilayah ini.⁸

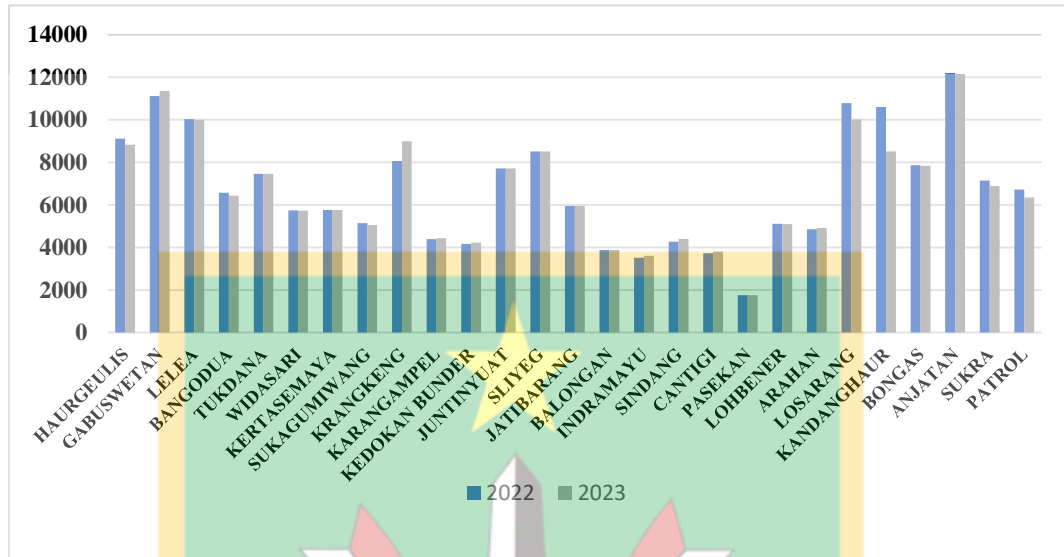
Kecamatan Anjatan merupakan wilayah yang memiliki luas lahan cukup besar di wilayah kabupaten indramayu, dimana luas lahan panennya berdasarkan data BPS Indramayu sebesar 12.461 Hektar yang mana wilayah ini termasuk yang memiliki luas panennya tertinggi di Indramayu, permasalahan pupuk subsidi selalu terjadi pada saat musim tanam dimana petani membutuhkan pupuk untuk kelangsungan bertani. Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian produktif yang dimanfaatkan untuk budidaya padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Kecamatan Anjatan juga dilintasi oleh beberapa sungai besar, seperti

⁷ DISKOMINFO INDRAMAYU, "DKPP Dan Kodim 0616 Indramayu Kawal Pupuk Bersubsidi," Diskominfo Indramayukab, 2023, <https://indramayukab.go.id/dkpp-dan-kodim-0616-indramayu-kawal-pupuk-bersubsidi/>. [Diakses pada 05/04/2024]

⁸ Aymeric Ricome, Jesus Barreiro-hurle, and Cheickh Sadibou, "Government Fertilizer Subsidies , Input Use , and Income : The Case of Senegal," *Food Policy* 124, no. September 2023 (2024): 102623, <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102623>.

Sungai Cimanuk dan Sungai Cipunegara, yang menjadi sumber air utama bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari Masyarakat.

Gambar 1. 1 Luas Panen Setiap Kecamatan Di Kabupaten Indramayu



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Kecamatan Anjatan adalah sebuah wilayah yang kaya akan potensi pertanian, budaya, dan sejarah. Kecamatan ini memiliki 13 desa yang tersebar di sepanjang aliran Sungai Cimanuk. Anjatan dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kabupaten Indramayu dan berkontribusi signifikan terhadap produksi beras nasional. Sektor pertanian menjadi perekonomian sebagian besar Kecamatan Anjatan. Lahan pertanian yang subur dan sistem irigasi yang baik memungkinkan petani untuk menanam padi sebanyak dua hingga tiga kali dalam setahun. Selain padi, petani di Anjatan juga membudidayakan berbagai komoditas pertanian lainnya, seperti jagung, kacang hijau, kedelai, dan sayuran.

Kecamatan Anjatan, sebagai salah satu lumbung padi di Kabupaten Indramayu, memiliki peran krusial dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, menjadikan sektor pertanian sebagai mayoritas perekonomian wilayah ini hal tersebut di perkuat dengan adanya Data BPS Kabupaten Indramayu tahun 2023 yang menyatakan

bahwa Kecamatan Anjatan memiliki usaha pertanian perorangan paling banyak sekitar 7,60% dari total 14.498 unit.⁹

Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen di sektor pertanian tanaman pangan Kabupaten Indramayu, penggunaan pupuk menjadi faktor yang sangat penting bagi petani Anjatan. Namun situasi dan kondisi daerah tersebut masih terdapat permasalahan terhadap kebutuhan pupuk subsidi yang sering kali disalahgunakan dan di manfaatkan oleh pihak tertentu, dimana stok pupuk ditimbun sehingga menjadi langka kemudian harga pupuk melambung tinggi sehingga hal ini membuat petani resah akan situasi tersebut.

Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu, sebagai sentra produksi padi, seharusnya memiliki akses yang mudah terhadap pupuk subsidi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keterlambatan penyaluran yang signifikan, terutama saat musim tanam. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penurunan produktivitas petani, tetapi juga memicu konflik sosial dan mengurangi kepercayaan petani terhadap program pemerintah. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk melalui program Kartu Tani, permasalahan ini masih terus berlanjut.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Anjatan adalah ketidakmerataan distribusi pupuk. Terjadi ketimpangan dalam alokasi dan distribusi pupuk bersubsidi antar wilayah di Kecamatan Anjatan. Beberapa daerah di kecamatan ini masih mendapatkan alokasi pupuk yang terbatas, sedangkan daerah lainnya mungkin mendapatkan pupuk secara berlebihan. Ketidakmerataan ini memerlukan penanganan yang adil dan proporsional untuk mencegah terjadinya ketimpangan dalam penggunaan dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di wilayah ini. Selain itu, ada juga permasalahan terkait logistik dan transportasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Beberapa wilayah di Kecamatan Anjatan sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor, sehingga pengiriman pupuk menjadi terhambat.

⁹ BPS, *Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023* (Indramayu: BPS Indramayu, 2023).

Pemerintah perlu memastikan tersedianya sarana transportasi yang memadai agar pupuk bersubsidi dapat didistribusikan dengan tepat waktu dan tanpa hambatan. Penyaluran pupuk bersubsidi juga perlu diperhatikan dari segi manajemen administrasi. Proses pendaftaran, pengajuan, dan pendistribusian pupuk bersubsidi perlu diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi guna menjamin efektivitas dan efisiensi program tersebut.

Selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, penggunaan pupuk bersubsidi juga perlu diberikan pemahaman yang lebih baik kepada petani. Pelatihan dan sosialisasi mengenai jenis pupuk yang tepat, dosis yang sesuai, dan cara penggunaan yang benar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk bersubsidi. Pemerintah harus bekerja sama dengan dinas pertanian dan lembaga terkait lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kerjasama dengan dinas pertanian dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna mendapatkan data dan informasi yang akurat tentang implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi.¹⁰

Kelangkaan pupuk adalah masalah berikutnya yang dihadapi petani. Seringkali ketika stok yang diperlukan tidak tersedia, menyebabkan harga pupuk naik. Ini disebabkan oleh ketidakseragaman dalam distribusi pupuk bersubsidi baik di tingkat petani maupun distributor wilayah. Hal ini dikomfirmasi dengan pernyataan Kementan yang menyatakan bahwa masalah yang dihadapi Kementan, yaitu dalam pengawasan, pengadaan, dan penyaluran pupuk meliputi belum tepat

¹⁰ Strategi Penyaluran, Pupuk Bersubsidi, and D I Indonesia, "Strategi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 10, no. 1 (2020): 69–89, <https://doi.org/10.35968/m-pu.v10i1.369>.

sasaran, perembesan (di mana pupuk bersubsidi dijual dengan harga yang tidak subsidi), kelangkaan, dan kenaikan harga di tingkat petani.¹¹

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penyaluran pupuk subsidi seperti Pemerintah telah melakukan pendataan petani secara akurat dengan menggunakan sistem e-RDKK (Registrasi Data Kendaraan dan Kendaraan Pertanian). Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk subsidi diberikan kepada petani yang berhak menerimanya. Selain itu juga Pemerintah telah memperkuat pengawasan penyaluran pupuk subsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Pengawasan yang kuat dapat mencegah penyelewengan pupuk subsidi dan Pemerintah telah memperbaiki sistem distribusi pupuk subsidi dengan menerapkan sistem tertutup. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk subsidi tersedia di pasaran dalam jumlah yang mencukupi dan tepat waktu.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi kepada petani tentang penyaluran pupuk subsidi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya penggunaan pupuk subsidi dan mencegah penyelewengan pupuk subsidi seperti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.¹²

Banyak permasalahan yang sering dihadapi oleh petani pada saat membeli pupuk subsidi dimana harga yang di keluarkan tidak sesuai dengan harga yang telah di tentukan, kemudian stok yang seharusnya mencukupi pada saat musim tanam seketika kurang dan hilang dari pasaran sehingga hal ini mengakibatkan petani terpaksa membeli pupuk non subsidi. Dalam hal permasalahan tersebut hampir seluruh wilayah memiliki fenomena yang sama khususnya di wilayah Kabupaten

¹¹ Kementerian Pertanian, “Kementan Tegaskan Stok Pupuk Bersubsidi Sesuai Permintaan,” psp.pertanian.go.id, 2023, <https://psp.pertanian.go.id/berita/kementan-tegaskan-stok-pupuk-bersubsidi-sesuai-permintaan>. [Diakses pada 05/04/2024]

¹² Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Indonesia, “Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022,” 2023.

Indramayu, dimana daerah tersebut memiliki wilayah pertanian padi yang sangat luas dan juga di juluki daerah lumbung padi Jawa Barat bahkan juga Nasional.

1.2 Identifikasi Masalah

Penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Anjatan, seperti di banyak daerah lainnya, seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks. Masalah-masalah ini dapat menghambat efektivitas program dan berdampak negatif pada produktivitas pertanian serta kesejahteraan petani. Dalam konteks di kecamatan Anjatan, terdapat faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi penyaluran pupuk bersubsidi. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pupuk bersubsidi. Selain itu, isu logistik dan distribusi juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan dimana masih terdapat penyalahgunaan pupuk subsidi serta pendataan yang tidak sesuai sehingga penyaluran tidak tepat kepada penerima yang berhak. Selain itu juga Proses persetujuan alokasi pupuk seringkali melibatkan banyak birokrasi, dari tingkat desa hingga kabupaten, yang menyebabkan penundaan dalam penyaluran. Hal ini juga berdampak pada Data RDKK seringkali tidak akurat karena adanya praktik manipulasi data oleh oknum tertentu untuk mendapatkan alokasi pupuk yang lebih besar dan mengakibatkan penyalahgunaan pupuk subsidi.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam tentang faktor-faktor ini dan bagaimana mereka berinteraksi di kecamatan Anjatan. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi di lapangan dan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan Implementasi kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi di kecamatan Anjatan.

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, tetapi juga menggali akar penyebabnya serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tahun 2023 ?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tahun 2023 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, serta permasalahan-permasalahan spesifik yang telah diidentifikasi dan dirumuskan, penelitian ini memiliki serangkaian tujuan yang hendak dicapai. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis Impelemntasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jawa Barat
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu Jawa Barat

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, Penulis berupaya menghasilkan informasi yang tidak hanya memperkaya landasan teori, tetapi juga dapat diaplikasikan secara praktis dengan harapan dapat memberikan wawasan berharga bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk mengetahui Impelemntasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2. Untuk Mengetahui Apa Saja yang Menghambat dan Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi
3. Sebagai tambahan informasi bagi peneliti selain yang diperoleh selama proses belajar di kampus.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Masyarakat: Kajian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat secara umum dan juga dapat memberikan perbaikan pada Impelemntasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2. Manfaat bagi Penulis: Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasannya dengan cara mengamati dan menganalisis

fenomena secara langsung tentang Impelemntasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

3. Bagi Universitas: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khazanah kepustakaan dan acuan universitas, khususnya di Program Studi Administrasi Publik. Ini akan memberikan informasi bermanfaat untuk penelitian selanjutnya, baik sebagai rujukan maupun pembanding.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Penelitian ini disusun dalam 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini memperkenalkan penelitian dengan menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari, merumuskan pertanyaan penelitian, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, membatasi ruang lingkup penelitian, serta menguraikan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Struktur bab ini mencakup lima sub bab. Pada sub bab pertama, akan disajikan tinjauan komprehensif terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji Kebijakan Pupuk Subsidi. Kemudian, akan dielaborasi teori dan konsep yang relevan, yang akan membentuk landasan teoretis bagi penelitian ini. Terakhir, kerangka pemikiran yang memandu penelitian ini akan dijelaskan secara terperinci. Pada sub bab kajian teori dan konsep berisikan tentang uraian pembahasan tentang konsep implementasi, kebijakan publik, konsep pupuk subsidi.. Kemudian pada sub bab kerangka pemikiran berisikan tentang uraian pembahasan terkait alur berpikir yang digunakan oleh penulis guna melakukan analisis permasalahan yang diteliti dalam proposal ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan penelitian, meliputi lokasi, waktu, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel, serta analisis data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, pemilihan

informan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, analisis, serta validitas penelitian. Pendekatan kualitatif diadopsi dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, sementara data sekunder dikumpulkan dari beragam sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel terkait, dokumen yang dipublikasikan, serta penelusuran informasi di internet. Di dalam pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder untuk kemudian dilakukan tahap pengolahan data. Di dalam menganalisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan penelitian yang digunakan adalah triangulasi teori dan sumber data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum implementasi kebijakan pupuk subsidi, hasil penelitian dan pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan akan di analisis dengan menggunakan indikator dari teori dan konsep Implementasi, dan akan memadukan data primer dan data sekunder guna mendialogkan teori dan konsep yang penulis gunakan serta menjelaskan temuan penelitian dan memberikan derajat penilaian terhadap penilaian Implementasi kebijakan pupuk subsidi,.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitiandan Implikasi konseptual, serta saran-saran yang diperlukan. Bab ini berisikan tiga sub bab yaitu kesimpulan, implikasi konseptual dan saran. Pada sub bab kesimpulan memberikan penjelasan terkait jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam tesis ini. Pada sub bab implikasi konseptual memberikan penjelasan terkait penilaian kesesuaian dari teori dan konsep yang digunakan dalam tesis ini. Pada sub bab saran memberikan penjelasan rekomendasi saran secara operasional yang penulis berikan terhadap hasil temuan dari penelitian tesis ini.